



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 266/HUMAS PMK/X/2022

Menko PMK Sidak Apotek di Bogor, Cek Kepatuhan Apotek Dalam Penjualan Obat Sirop

**Sesuai SE Kemenkes, Apotek Tidak Diperkenankan Menjual Obat Sirop*

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke apotek-apotek di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (22/10/2022).

Sidak tersebut dilakukannya untuk mengecek kepatuhan apotek dalam menaati instruksi Kemenkes untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat mengingat adanya penyakit Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal yang menimpa anak-anak. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury).

Terdapat tiga apotek yang disidak Menko PMK, yakni di Apotek Sehat, Apotek di RS PMI Bogor, dan Apotek Villa Duta. Dari tiga apotek tersebut, Menko PMK mendapatkan pengelola sudah mematuhi himbauan Kemenkes untuk tidak menjual obat sirup.

Di apotek yang disidak Menko PMK, sudah terdapat pengumuman bahwa sementara tidak memperjualbelikan obat sirup kepada masyarakat. Kemudian didapatkan rak obat sirup sudah dipisahkan atau dikarantina dari obat-obat yang masih diperjualbelikan. Untuk rak obat sirup juga diberi segel. Ada pula yang mengambil keputusan untuk mengemas obat sirup supaya tidak digunakan.

"Semua yang kita lihat Alhamdulillah sudah mematuhi. Yaitu sudah tidak lagi melayani penjualan dan resep berbentuk obat sirup," kata Menko PMK usai melakukan sidak.

Lebih lanjut, Menko PMK juga menemukan apotek-apotek yang didatanginya itu sudah mensiasati pengganti obat sirup dengan meracik obat puyer. "Kalau ada resep dokter sudah memberikan alternatif dalam bentuk puyer sehingga memang butuh waktu meracik lagi, tetapi itu solusi tepat," ujarnya.

Menurut Menko PMK, langkah yang telah dilakukan oleh tiga apotek yang disidak di Kota Bogor ini adalah contoh bagus dalam mematuhi keputusan pemerintah. Menurutnya hal itu perlu dicontoh oleh seluruh pengelola apotek di seluruh Indonesia.

Dia juga menegaskan, lebih baik obat sirup dihentikan peredarannya sementara daripada membahayakan nyawa anak-anak yang merupakan penerus pemimpin bangsa.

"Ini contoh bagus untuk merespons peristiwa yang tidak mengenakan menimpa anak kita. Yang penting anak kita supaya selamat dulu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat untuk mengedarkan surat edaran kemenkes ke seluruh apotek dan RS di Kota Bogor. Dia juga

mengimbau agar seluruh pengelola apotek untuk menaati keputusan Kemenkes. Dia juga meminta masyarakat untuk sementara waktu tidak mengonsumsi obat sirup. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**